

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI IV DPR RI  
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,  
SERTA KELAUTAN)**

---

---

- Tahun Sidang : 2019-2020  
Masa Persidangan : IV  
Rapat ke- : 2  
Jenis Rapat : Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari/Tanggal : Senin, 22 Juni 2020  
Waktu : 10.20 s.d. 15.45 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)  
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta.
- Acara : Membahas:  
1. Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2019;  
2. Hasil Pemeriksaan BPK Semester II TA. 2019;  
3. RKA-K/L dan RKP-K/L Tahun 2021; dan  
4. Isu-Isu Aktual.
- Ketua Rapat : Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP)  
Sekretaris Rapat : Drs. Budi Kuntaryo (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)  
Hadir : A. 46 Anggota dari 55 Anggota Komisi IV DPR RI  
B. Hadir Pemerintah:  
1. Dr. Syahrul Yasin Limpo, S.H., M.Si., M.H. (Menteri Pertanian);  
2. Dr. Ir. Momon Rusmono, M.S. (Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian);  
3. Dr. Ir. Sumardjo Gatot Irianto, M.S., DAA. (Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian)  
4. Dr. Ir. Suwandi, M.Si. (Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian);  
5. Dr. Ir. Prihasto Setyanto, M.Sc. (Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian);  
6. Dr. Ir. Kasdi Subagyo, M.Sc. (Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian);  
7. Dr. drh. I Ketut Diarmita, M.P. (Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian);

8. Dr. Sarwo Edhy, S.P., M.M. (Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian);
9. Dr. Ir. Fadry Djufry, M.Si. (Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian);
10. Prof (R). Dr. Ir. Dedi Nursyamsi, M.Agr. (Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementerian Pertanian);
11. Dr. Ir. Agung Hendriadi, M.Eng. (Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian);
12. Ir. Ali Jamil, M.P., Ph.D. (Kepala Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian);
13. Aas Asikin Isdat, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia  *Holding Company*;
14. Karyawan Gunarso, Direktur Utama PT Sang Hyang Seri (Persero);
15. Harry Warganegara, Direktur Utama PT Berdikari (Persero);
16. Maryono, Direktur Utama PT Pertani (Persero).

## I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian membahas Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2019, Hasil Pemeriksaan BPK Semester II TA. 2019, RKA-K/L dan RKP-K/L Tahun 2021, dan Isu-Isu Aktual, dibuka pukul 10.20 WIB oleh Ketua Rapat, Sudin, S.E. dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas Pagu Indikatif Kementerian Pertanian dalam RKA-K/L dan RKP-K/L Tahun 2021 sebesar **Rp18.432.578.590.000,00** (Delapan Belas Triliun Empat Ratus Tiga Puluh Dua Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribuan Rupiah) berdasarkan Surat Bersama Pagu Indikatif (SBPI) Tahun Anggaran 2021 antara Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS Nomor: S-376/MK.02/2020 dan B.310/M.PPN/D.8/PP.04.02/05/2020, dengan komposisi program per-Eselon I sebagai berikut:
  - a. **Sekretariat Jenderal**, sebesar Rp1.764.543.174.000,00 (Satu Triliun Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Miliar Lima Ratus Empat Puluh Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Empat Ribuan Rupiah);
  - b. **Inspektorat Jenderal**, Rp99.581.831.000,00 (Sembilan Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Ribuan Rupiah);

- c. **Direktorat Jenderal Tanaman Pangan**, Rp4.538.936.274.000,00 (Empat Triliun Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah);
- d. **Direktorat Jenderal Hortikultura**, Rp956.146.411.000,00 (Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Miliar Seratus Empat Puluh Enam Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Rupiah);
- e. **Direktorat Jenderal Perkebunan**, Rp1.192.670.698.000,00 (Satu Triliun Seratus Sembilan Puluh Dua Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah);
- f. **Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan**, Rp1.919.759.789.000,00 (Satu Triliun Sembilan Ratus Sembilan Belas Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah);
- g. **Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian**, Rp3.032.440.445.000,00 (Tiga Triliun Tiga Puluh Dua Miliar Empat Ratus Empat Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);
- h. **Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian**, Rp1.707.118.372.000,00 (Satu Triliun Tujuh Ratus Tujuh Miliar Seratus Delapan Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah);
- i. **Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian**, Rp1.379.187.543.000,00 (Satu Triliun Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Miliar Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah);
- j. **Badan Ketahanan Pangan**, Rp875.903.216.000,00 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Tiga Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Rupiah);
- k. **Badan Karantina Pertanian**, Rp966.290.837.000,00 (Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Selanjutnya, Komisi IV DPR RI akan menelaah RKA dan RKP Tahun 2021 Kementerian Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2. Komisi IV DPR RI mengapresiasi komitmen Menteri Pertanian untuk menjamin tidak melakukan impor terhadap komoditas strategis yang dapat diproduksi secara optimal di dalam negeri.
- 3. Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Pertanian agar segera menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan BPK Semester II TA. 2019, terutama terkait dengan fungsi pengawasan dalam kepatuhan pelaku usaha perkebunan untuk memiliki izin usaha perkebunan dan melaksanakan kewajibannya memfasilitasi pembangunan kebun plasma masyarakat, sebesar 20%.

4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk merevisi target-target eksportnya sehubungan dengan perkembangan ekonomi dunia pasca COVID-19 dan kemudian memperhatikan kondisi produksi dan harga komoditas di dalam negeri. Hal ini sehubungan dengan terjadinya kasus produksi yang tidak diserap pasar dan mengalami penurunan harga yang sangat tajam.
5. Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Pertanian mempertimbangkan dengan lebih cermat sehubungan dengan rencana pembukaan lahan sawah yang akan memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap perubahan tata ruang dan ekosistem lingkungan. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI menyarakankan agar memanfaatkan lahan-lahan milik Pemerintah, seperti lahan milik BUMN Pertanian dan Kehutanan yang dapat dioptimalkan penggunaannya.
6. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan mitigasi dan adaptasi risiko kebakaran dan kekeringan serta ancaman gangguan organisme pengganggu tanaman, yang akan menjadi dasar dalam menyusun RKA-K/L dan RKP-K/L Tahun 2021.
7. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar dalam upaya peningkatan produksi dilakukan pemetaan berdasarkan potensi lokal dan kesesuaian agroekosistem pertanian, sebagai basis dalam menyusun RKA-K/L dan RKP-K/L Tahun 2021 agar tepat sasaran.
8. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian dalam menyusun RKA-K/L dan RKP-K/L Tahun 2021 fokus pada program padat karya dan upaya peningkatan produksi pertanian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar melakukan realokasi anggaran yang lebih mengakomodasi peningkatan produksi pada Direktorat Jenderal teknis, melalui penguatan dalam kegiatan pendukung produksi, antara lain perbaikan irigasi, embung, bantuan alat dan mesin pertanian yang tepat guna, Unit Pengolahan Pupuk Organik, dan unit pengolahan pascapanen komoditas pertanian.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 15.45 WIB.

Menteri Pertanian,

Ttd.

**Dr. Syahrul Yasin Limpo, S.H., M.Si., M.H.**

Komisi IV DPR RI  
Ketua Rapat,

Ttd.

**Sudin, S.E.**

A-151

